

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045, Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta berkarakter (Saeful Rahmat, 2016). Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari individu, kelompok maupun suatu bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya (Yasir et al., 2022). Selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea IV bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini pendidikan menjadi penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan adanya pendidikan seorang individu mampu untuk mengaktualisasikan dirinya (Indy, 2019) serta memberikan kemajuan pemikiran umat manusia yang bermutu melalui penerapan literasi.

Dalam kurun beberapa waktu, *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melakukan studi asesmen terhadap kinerja murid berusia 15 tahun dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan pemahaman membaca. Studi yang dimulai pada tahun 2000 tersebut dinamai *The Programme for International Student Assessment* (PISA). Merujuk pada data OECD (2014) selama decade terakhir Finlandia telah menjadi pemimpin utama internasional dalam pendidikan dengan skor tertinggi dalam penilaian PISA internasional (Agustyaningrum & Himmi, 2022). Pada tahun 2018 survei PISA menyatakan bahwa China menduduki peringkat tertinggi dengan nilai 590, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang berkontribusi pada kesuksesan negara yaitu kurikulum yang mendalam dan cakupan pembelajaran yang sempit (Pratiwi, 2016). Selanjutnya terdapat negara terkecil namun memiliki nilai PISA tinggi hingga mencapai skor 551 yaitu Singapura. Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan pendidikan dalam menyejahterakan guru berupa insentif, beasiswa, pelatihan dan pengembangan diri, selain itu memberikan subsidi pendidikan anak bagi orang

tua yang tidak mampu. Adapula kebijakan tentang seleksi anak ke dalam sekolah akademik dan vokasi sejak usia 12 tahun (Pratiwi, 2016).

Kondisi di atas berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia berdasarkan survei PISA berada pada peringkat 74 dari 79 negara yang diukur dari segi matematika, membaca dan sains. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran pada kompetensi literasi dan numerasi serta mencakup pengembangan seluruh potensi peserta didik, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lebih dari 50% anak usia lima belas tahun di Indonesia tidak menguasai keterampilan dasar membaca atau matematika. Berdasarkan data tersebut memaparkan bahwa rendahnya prestasi siswa pada kualitas Pendidikan Indonesia rendah, sehingga peranan guru yang berkompeten masih sangat dibutuhkan dan masih perlu ditingkatkan sebagaimana riset UNESCO *Global Education Monitoring (GEM) Report 2020* menyatakan bahwa kualitas Pendidikan di seluruh dunia mengalami pemerosotan yang diakibatkan kurangnya akan finansial sehingga banyak peserta didik mengalami berhenti sekolah akibat pandemic covid-19 (Wahyudi et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan maksimal dan diberlakukannya perbaikan responsive sesuai dengan tuntutan perubahan zaman (Agustyaningrum & Himmi, 2022). Seperti yang kita ketahui bahwa negara yang memiliki prestasi yang baik pada evaluasi PISA rata-rata memiliki perekonomian dan teknologi maju (Nasution et al., 2019). Namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik bermacam-macam menjadi tantangan tersendiri untuk pemerataan akses teknologi. Lebih memprihatinkan lagi kalau kualitas pendidikan Indonesia dilihat dari sisi Karakter. Indikator menunjukkan, masih terlalu banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan yang harus diselesaikan bangsa Indonesia.

Ketidakmerataan terhadap perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan di berbagai daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, hal ini masih menjadi isu penting dalam pemerataan mutu. Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan kondisi sosial ekonomi dan geografis serta kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda sehingga memengaruhi kemampuan daerah dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Pengalihan tanggung jawab melalui desentralisasi layanan pendidikan ke pemerintah daerah yang bervariasi ini memicu kekhawatiran politisasi dalam pengelolaan pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara lain. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia diantaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas guru atau tenaga pendidik, minimnya sarana dan prasarana pendukung,

serta rendahnya minat peserta didik dalam berliterasi. Literasi tidak hanya diidentikkan dengan kemampuan membaca tetapi juga menulis.

Sejak Tahun 1970-an, yakni melalui Instruksi Presiden (Inpres Nomor 10 Tahun 1973) tentang Pembangunan Gedung Sekolah Dasar, Indonesia secara massif meluaskan akses pendidikan dasar. Kebijakan yang dikenal “SD Inpres” ini diikuti oleh penataan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penempatan guru, serta penambahan buku pelajaran dan alat peraga untuk menunjang pembelajaran. Dampak dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya jumlah gedung sekolah dan bertambahnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar. Perluasan akses pendidikan semakin diperkuat di era Reformasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan memastikan negara wajib hadir memberikan layanan pendidikan dasar, memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara untuk Pendidikan, serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara khusus mengatur perihal wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini, mendelegasikan kewenangan pendidikan kepada Pemerintah Daerah, serta Manajemen Berbasis Sekolah.

Melalui berbagai kebijakan yang disampaikan di atas, angka partisipasi Pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat. Selain itu, pemerintah berhasil menurunkan angka putus sekolah di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK selama kurun waktu 2015 – 2019, bahkan angka putus sekolah jenjang SMA turun sebesar 72% dari 7,01% pada tahun 2015 menjadi 1,97% pada tahun 2019. Capaian penurunan ini, merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional, yaitu Program Indonesia Pintar yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dengan cara memberikan bantuan kepada siswa SD, SMP, SMA, dan SMK dari keluarga miskin untuk membiayai pendidikan. (Renstra Kemendikbud 2020 – 2024). Turunnya angka putus sekolah berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA Sederajat. APK SMP/MTs Sederajat meningkat dari 88,6% pada tahun 2014 menjadi 90,6% pada 2019. Sedangkan, APK SMA/SMK/MA Sederajat meningkat dari 74,3% pada tahun 2014 menjadi 83,98% pada 2019. Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK tersebut. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas saat ini mencapai 8,75 (Renstra Kemendikbud 2020—2024).

Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan di atas telah mampu mendorong terselenggaranya layanan pendidikan yang lebih berkualitas, tetapi belum mampu memberikan dampak lebih luas dan merata ke lebih banyak sekolah dan daerah. Keterbatasan dampak

tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, intervensi yang dilakukan sering menysasar kepada sekolah-sekolah dengan mutu yang “sudah baik” sehingga, alih-alih mendorong pemerataan mutu pendidikan, justru dapat menambah disparitas mutu dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. Kedua, program yang diberikan bersifat bantuan dana atau bantuan sarana fisik sehingga proses pengimbasan ke sekolah lain sulit dilakukan. Ketiga, keberlanjutan program peningkatan mutu tidak didukung oleh ekosistem yang memadai baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi yang menjamin keberlanjutan program di tingkat nasional tidak tersedia, begitu pula upaya adopsi dan perluasan program (*scale out*) di tingkat daerah tidak dilakukan. Ekosistem pengembangan mutu dapat terbentuk apabila didukung oleh regulasi, kebijakan, dan penganggaran yang berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. Generasi muda harus dibekali dengan Pendidikan karakter. Pendidikan bukan hanya mencetak peserta didik yang cerdas, tetapi juga peserta didik yang berkarakter. Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, agar generasi yang lahir menjadi generasi yang memiliki karakter kuat untuk menghadapi tantangan Indonesia di kemudian hari. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hadir dengan transformasi Pendidikan. Transformasi pendidikan sangat diperlukan untuk mengubah praktik pendidikan menjadi yang kurang berpihak pada anak menjadi berpusat pada anak. Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian telah melakukan sejumlah transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar. Diantaranya Pendidikan yang mampu menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik melalui pembelajaran yang holistik, Platform Rapor Pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan, Kurikulum Merdeka untuk mengembangkan karakteristik dan kompetensi, Program Dana BOS dan BOP yang lebih fleksibel, dan Dana Indonesiana yang mewadahi gagasan para seniman dan pelaku budaya.

Transformasi Pendidikan untuk perbaikan mutu pendidikan Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan “Merdeka Belajar” atau “Kebebasan Belajar”. Konsep “Kebebasan Belajar”, yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini kemudian diterima mengingat visi misi Pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan (Sibagariang, Sihotang & Murniarti, 2021: 89). Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi acuan dalam transformasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan saat ini.

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Program sekolah penggerak ini diharapkan dapat mendorong pendidikan untuk melaksanakan transformasi diri demi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah secara nasional. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Dalam konteks Sekolah Penggerak, *supply side* (sisi pasokan) dan *demand side* (sisi permintaan) merujuk pada dua aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Supply side* berkaitan dengan aspek pasokan atau penyediaan, yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan pengembangan kurikulum (Khannanah & Juniati, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, pengembangan bahan ajar yang inovatif, dan pemberian dukungan teknologi dan sumber daya lainnya kepada guru dan sekolah (Daga, 2022). *Demand side*, di sisi lain, berkaitan dengan aspek permintaan atau kebutuhan, yang berfokus pada memenuhi kebutuhan siswa dalam hal kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan siswa dalam hal sumber daya, seperti buku-buku dan teknologi, serta pembangunan lingkungan belajar yang kondusif serta tingkat partisipasi dan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Program Sekolah Penggerak memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di tingkat mikro, yaitu pada level sekolah. Namun, implementasi program tersebut memerlukan dukungan kebijakan dari level meso yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, pemerintah harus menyediakan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, kebijakan aspek meso dapat memberikan dukungan dan arahan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program Sekolah Penggerak secara efektif. Kebijakan aspek mikro, di sisi lain, berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah, guru, dan staf sekolah di tingkat sekolah dapat mengimplementasikan program tersebut dengan cara yang efektif dan efisien. Kebijakan aspek mikro dapat menentukan bagaimana program Sekolah Penggerak dijalankan di masing-masing sekolah dan bagaimana program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah. Oleh karena itu, kebijakan aspek meso dan mikro harus berjalan seiringan dan terintegrasi dengan baik agar program Sekolah Penggerak dapat berhasil dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Tabel 1.1 Target Sekolah Penggerak

Tahun Ajaran	Jumlah		
	Provinsi	Kab/Kota	Sekolah Penggerak
2021-2022	34	111	2.500
2022-2023	34	250	10.000
2023-2024	34	514	20.000
2024-2025	34	514	40.000
dst	-	-	-

Sumber: Program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek 2022

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara diharapkan dapat mengawal Kebijakan Merdeka Belajar dengan berbagai program nasional untuk meningkatkan mutu Pendidikan. DKI Jakarta juga diharapkan menjadi barometer pendidikan yang unggul dan bersaing di era digitalisasi. Hal ini tidak tentu saja tidak mudah karena diperlukan sinergi antar berbagai pihak dan pada kenyataannya DKI Jakarta ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Melalui kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak nomor 05.1/III/NK/2021, nomor 8 Tahun 2021 diharapkan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, pelaksana program sekolah penggerak yang telah lulus seleksi angkatan pertama ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak No. 6555/C/HK.00/2021 bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki 19 Sekolah Penggerak terdiri atas Jakarta Timur 11 Sekolah Penggerak dan Jakarta Selatan 8 Sekolah Penggerak. Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi sasaran program sekolah penggerak pada tahap pertama sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian dilaksanakan di sekolah yang telah ditetapkan menjadi pelaksana program sekolah penggerak pada tahun 2021/2022 sebagai angkatan pertama. Terkait *demand side* dan *supply side* dalam penelitian ini, yang menjadi *Demand Side* yaitu Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah menerima SK Penetapan. Penetapan tingkat sekolah dasar sebagai sasaran penelitian adalah karena pendidikan di *sekolah*

dasar merupakan *pondasi* yang amat penting untuk membekali siswa melangkah pada jenjang *pendidikan* selanjutnya. Pendidikan di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Dengan membantu anak-anak mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, serta nilai-nilai moral dan etika yang positif, diharapkan anak-anak dapat menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi dunia yang kompleks di masa depan. Dipilihnya DKI Jakarta sebagai sampel yaitu merujuk pada data sekolah penggerak pada 30 Januari 2023 bahwa Jakarta Selatan dan Jakarta Timur telah mencapai nilai kontribusi yang tinggi yaitu diatas 70% ketimbang wilayah lainnya. Peneliti melaksanakan penelitian di 5 (lima) Sekolah Dasar yang masing-masing mewakili Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang terbagi menjadi wilayah I dan II. Adapun pemilihan sekolah merujuk pada data pokok pendidikan untuk kondisi guru, tenaga pendidik, pendidikan dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang mayoritas berjumlah tinggi (kelas gemuk). Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sebagai salah satu sampel penelitian dipilih berdasarkan pada keterpilihan wilayah di DKI Jakarta yang menjadi pilot project PSP yang diluncurkan pada tahun 2021.

Keberadaan program sekolah penggerak yang diterapkan pada sekolah dasar diketahui menjadi salah satu program yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam memenuhi capaian belajar dengan siswa diberikan kebebasan untuk mendapatkan materi melalui modul ajar yang diberikan sekolah serta media lainnya yang dapat diakses oleh siswa secara mandiri agar siswa memiliki pemahaman yang baik terutama pada pengetahuan alam dan pengetahuan sosial baik secara fenomena yang ada dengan cara mengobservasi, mengeksplorasi dan memahami dengan kemampuan inkuiri siswa.

Program Sekolah Penggerak menjadi salah satu jawaban dari tantangan yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia. Melalui penguatan kebijakan, peningkatan kualitas guru dan sekolah, serta perhatian khusus pada sekolah-sekolah yang memerlukan dukungan, program ini berusaha untuk mengatasi kendala dalam mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Dari latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa Program Sekolah Penggerak diharapkan dapat berperan sebagai program penopang dalam upaya mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah secara holistik. Melalui transformasi pembelajaran, dukungan kebijakan yang baik, dan implementasi yang tepat di tingkat mikro dan meso, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan khususnya di era 5.0.

Berdasarkan fenomena di atas maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar untuk Mencapai Hasil Pembelajaran Holistik (Studi Implementasi Program Sekolah Penggerak Tingkat Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta)”.

B. Identifikasi Masalah

Kebijakan Sekolah Penggerak adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui beberapa strategi, seperti peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan manajemen sekolah. Namun, terdapat beberapa masalah implementasi kebijakan Sekolah Penggerak yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Program Sekolah Penggerak menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan visi Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi institusi pendidikan dan peserta didik dalam berinovasi dan berkreasi. Program ini mendukung visi Merdeka Belajar dalam memberdayakan sekolah-sekolah untuk melakukan transformasi diri secara efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara holistik.
2. Program Sekolah Penggerak memberikan perhatian khusus pada sekolah-sekolah dengan mutu yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, program ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah dan sekolah. Dengan adanya perhatian lebih pada sekolah-sekolah yang memerlukan dukungan, diharapkan kesenjangan mutu pendidikan dapat diperkecil.
3. Program Sekolah Penggerak tidak hanya fokus pada kompetensi literasi dan numerasi siswa, tetapi juga memberikan perhatian pada pengembangan karakter siswa. Hal ini sejalan dengan visi Merdeka Belajar yang mengutamakan pembentukan manusia berkualitas dan berkarakter dalam rangka mencapai Indonesia Emas.
4. Program Sekolah Penggerak berfungsi sebagai salah satu program penopang bagi upaya mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Dengan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah, program ini berkontribusi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkarakter untuk menghadapi tantangan di masa depan.
5. Program Sekolah Penggerak menjadi salah satu jawaban dari tantangan yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia. Melalui penguatan kebijakan, peningkatan kualitas guru dan sekolah, serta perhatian khusus pada sekolah-sekolah yang memerlukan dukungan, program ini berusaha untuk mengatasi kendala dalam mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

6. Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan di Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan merupakan wilayah keterpilihan semenjak program dilanching pada tahun 2021 sebagai wilayah *pilot project*. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara diharapkan menjadi barometer peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
7. Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan di DKI Jakarta belum dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh sehingga belum terlihat hasilnya.

Pentingnya menganalisis hasil implementasi program ini untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang telah dibuat, sehingga batasan penelitian ini yaitu tentang Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar untuk Mencapai Hasil Pembelajaran Holistik (Studi Implementasi Program Sekolah Penggerak Tingkat Sekolah Dasar di DKI Jakarta).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka ditentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar untuk Mencapai Hasil Pembelajaran Holistik pada Sekolah Dasar Penggerak di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana Dinamika Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar untuk Mencapai Hasil Pembelajaran Holistik pada Sekolah Dasar Penggerak di Provinsi DKI Jakarta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari dua pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar untuk Mencapai Hasil Pembelajaran Holistik (Studi Implementasi Program Sekolah Penggerak Tingkat Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta).
- 2) Menganalisis Dinamika Transformasi Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar untuk Mencapai Hasil Pembelajaran Holistik (Studi Implementasi Program Sekolah Penggerak Tingkat Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta).

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi pengetahuan bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat terkait implementasi kebijakan di bidang pendidikan dalam konteks ilmu administrasi publik serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya di sektor publik.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh akan implementasi kebijakan di bidang pendidikan serta dapat dijadikan acuan dan menjadi bahan masukan khususnya bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah selaku unit utama yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan di Kemendikbudristek.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab berisi uraian secara singkat tentang isi dari materi yang ada dalam setiap bab. Hal ini untuk mempermudah baik bagi penulis maupun pembaca dalam melihat secara keseluruhan isi dari tesis yang peneliti tulis. Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi konsep-konsep maupun teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Konsep-konsep maupun teori-teori ini sifatnya untuk mempermudah peneliti dalam membahas suatu permasalahan yang ada dalam penelitian tesis yang peneliti tulis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik analisis menggunakan pemeriksaan

keabsahan data, dengan cara wawancara dan observasi melalui langkah-langkah penelitian kualitatif menurut Jhon Creswell dan analisis Miles dan Huberman.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis lebih awal akan mendeskripsikan objek penelitian yaitu deskripsi gambaran umum objek penelitian seperti latar belakang Kebijakan Merdeka Belajar, serta tujuan dan sasaran Program Sekolah Pengerak yang berupa literatur dokumen, dan hasil wawancara dari temuan data di lapangan. Pada bab ini juga berisi hasil dari penelitian tesis di lapangan serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian lapangan, temuan yang dibahas dengan mereduksi konsep maupun teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan, Implikasi teori dan Saran merupakan upaya penulis untuk memberikan penjelasan yang telah disimpulkan berdasarkan dari analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga dengan adanya kesimpulan maka penulis memberikan saran yang berguna untuk sebuah solusi, yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran diberikan bersifat objektif, membangun, mendidik dan sesuai dengan topik yang diteliti.

